



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 81-02-11-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024**

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **22:21** WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh:

Perseorangan **ERDINA ADAM Partai Garda Republik Indonesia** untuk Provinsi **Papua**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permohonan yang belum lengkap akan dilengkapi pada saat perbaikan permohonan terhitung 3 x 24 Jam sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Minggu** tanggal **dua puluh empat** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **14:34** WIB.

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 81-02-11-33/AP3-DPR-
DPRD/Pan.MK/03/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : ERDINA ADAM
Kuasa Hukum :
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : 23 Maret 2024 pukul 22:21 WIB

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	File softcopy permohonan tidak menguraikan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Prov., DPRD Kab/Kota secara Nasional Tahun 2024; Uraian alamat dan identitas pemohon tidak lengkap; file softcopy permohonan tidak ditandatangani.
2	Permohonan (doc/docx)	1	File Softcopy permohonan (doc/docx) tidak sama dengan file softcopy permohonan berformat pdf
3	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1	File Softcopy tidak melampirkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Prov., DPRD Kab/Kota secara Nasional Tahun 2024
4	Surat Persetujuan Partai Politik	1	File softcopy tidak melampirkan Surat Persetujuan Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bersangkutan
5	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	File Softcopy tidak melampirkan Daftar Alat Bukti
6	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	File Softcopy tidak melampirkan Daftar Alat Bukti

7	Alat Bukti	1	File Softcopy tidak melampirkan Alat Bukti
---	------------	---	--------------------------------------------

Jakarta, 24 Maret 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.
- **Perkembangan penanganan perkara dapat dipantau d situs (website) resmi Mahkamah Konstitusi www.mkri.id**